



Kolaborasi dan Koordinasi Data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

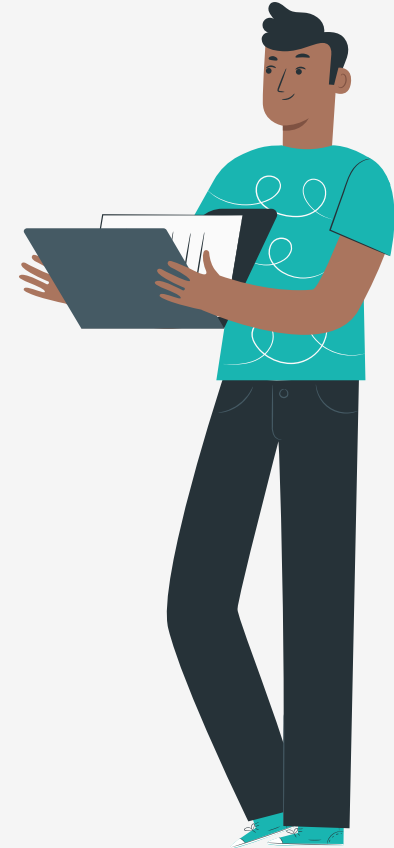
Disampaikan dalam kegiatan
Bimbingan Teknis
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Jakarta, 20-22 Juni 2023





Outline

1. Amanat Regulasi
2. Latar Belakang
3. Infrastruktur SPBE
4. Pusat Data Nasional
5. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
6. Jaringan Intra Pemerintah





Perpres 95/2018	Perpres 39/2019	Perpres 18/2020	PP 71 / 2019	
1. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2018 – 2022)	Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data , dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk .	Ttg RPJMN 2020-2024.	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	
2. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai (Cloud Service, Integrasi Kanal Layanan) (2018 – 2025)		Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2020 – 2022)		Pasal 27: Penyelenggaraan PSE memperhatikan Interoperabilitas dan kompatibilitas SE terkait
3. Penerapan Big Data Pemerintah dan Penerapan Kecerdasan Buatan (2019 – 2025)		Perpres 132/2022	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	Permen 1 / 2023 Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI





Dengan Kolaborasi



INGAT INI YA!
INOVASI TIDAK HARUS BIKIN APLIKASI



Menteri PANRB
Abdullah Azwar Anas

ARAHAN STRATEGIS SPBE SUMMIT 2023

1. Pembangunan layanan digital berbasis masyarakat (*citizen centric*).
2. Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi *Digital Transformation Agent (DTA)* dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.
3. Moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
4. Konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah.
5. Penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital.
6. Interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan arsitektur SPBE.

Jakarta, 20 Maret 2023

Sri Mulyani Kesal Kementerian Punya 24.000 Aplikasi, Tapi Tidak Semua Beroperasi

kumparanBISNIS 

11 Juli 2022 10:24 · waktu baca 1 menit



 Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) di penutupan Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di JCC, Jumat (18/02/2022). Foto: M Risyah Hidayat/ANTARA FOTO



Kabar Terbaru



Kominfo Mau Rilis Super-app, Suntik Mati Puluhan Ribu Aplikasi Lain

Bagian dari upaya efisiensi kebijakan satu data. Ada 24.400 aplikasi yang saat ini dikelola sendiri-sendiri oleh K/L hingga pemerintah daerah.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 143 /M.KT.03/2022 29 Juli 2022
Sifat : Biasa
Hal : Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan
Teknologi Digital secara Terpadu pada Hasil Inovasi Digital dalam
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN

Yth.
Kepala Lembaga Administrasi Negara
di
tempat

Salah satu prioritas kerja Bapak Presiden di tahun 2019 – 2024 yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Selanjutnya, untuk penguasaan IPTEK diantaranya dilaksanakan melalui percepatan transformasi digital, selaras dengan kerangka regulasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan informasi.

Berkenaan dengan pembangunan SDM, khususnya SDM Aparatur maka Lembaga Administrasi Negara (LAN), telah melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) Pegawai ASN secara nasional untuk mewujudkan SDM Aparatur unggul. Berdasarkan hal tersebut, kami sangat mengapresiasi atas pelaksanaan penyelenggaraan diklat kepemimpinan yang telah banyak menghasilkan inovasi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kualitas inovasi yang dihasilkan, terutama dalam mendukung percepatan transformasi digital, maka kami mengharapkan agar penyelenggaraan diklat oleh LAN, dapat berperan besar dalam menghasilkan inovasi digital.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, saat ini telah terbentuk berbagai aplikasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan layanan digital, namun demikian pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut, saat ini masih cenderung bersifat silo-silo ataupun sektoral, sehingga diperlukan upaya yang kuat untuk dilakukan integrasi layanan digital, untuk peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Kondisi tersebut, juga berimplikasi dalam memberikan beban terhadap risiko operasional, risiko keamanan informasi, dan keuangan negara.

Memperhatikan hal tersebut, berbagai inovasi digital, terutama yang akan menjadi kegiatan pembangunan aplikasi atau sistem informasi, agar diprioritaskan berupa analisis perubahan proses bisnis yang lebih sistematis, sederhana, dan terpadu. Hal ini akan membantu pengembangan layanan pemerintah yang terpadu dan sederhana. Selanjutnya, hasil analisis perubahan proses bisnis tersebut, akan menjadi referensi dalam pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang terpadu, sesuai dengan kerangka regulasi dan panduan teknis SPBE. Melalui upaya ini, diharapkan dapat menghindari dan mengurangi duplikasi pembangunan aplikasi dan potensi inefisiensi anggaran. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip keterpaduan SPBE di tingkat instansi maupun nasional, guna mewujudkan *World Class Government*.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Rt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,

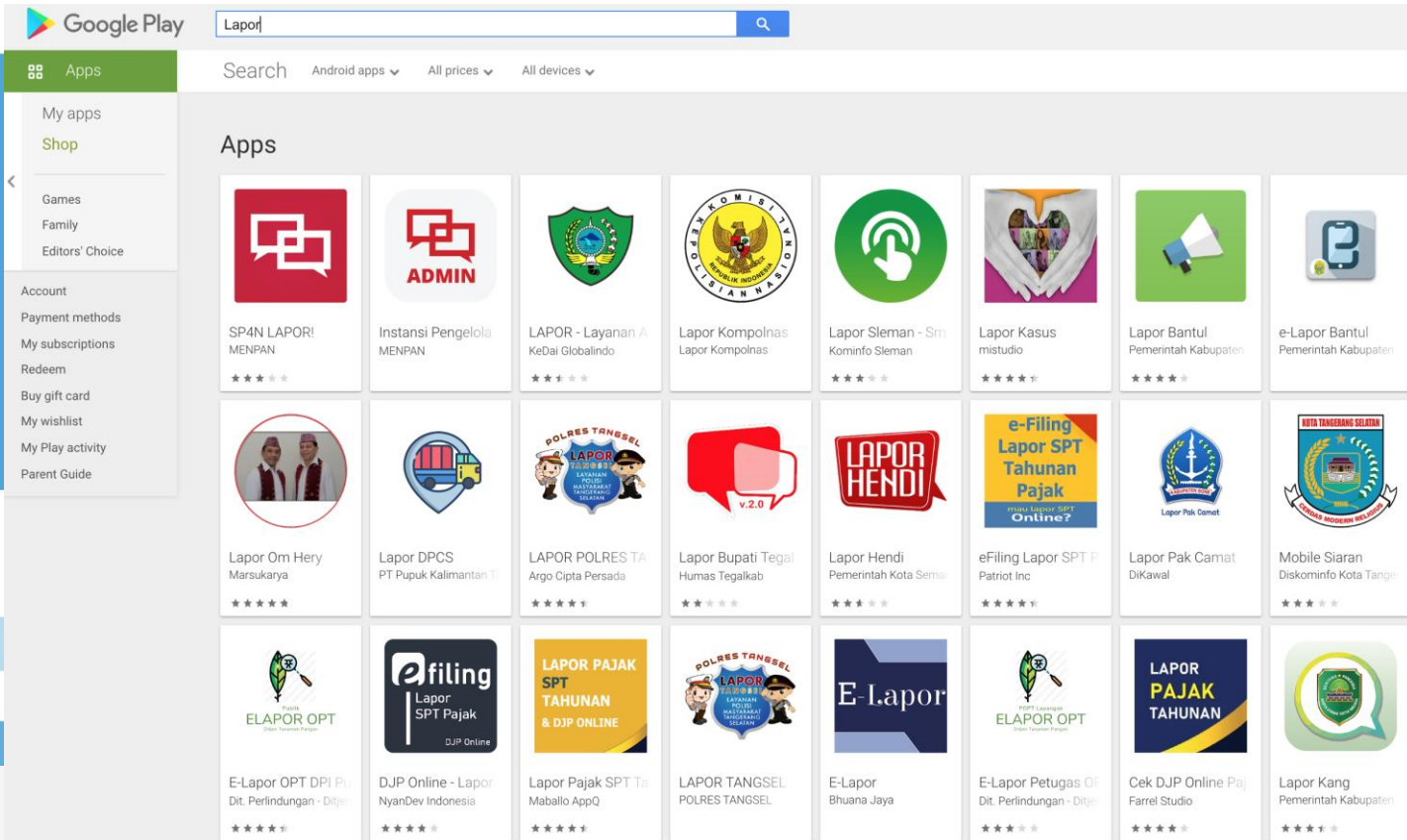
Moh. Mahfud MD

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.



Contoh : Ragam Aplikasi Laporan di Playstore



Studi Kasus

Saat ini masing-masing daerah memiliki Aplikasi Pelaporan silo-silo, tidak terintegrasi dan tidak komprehensif.

Pemeliharaan aplikasi pun beragam ;

- Rilis lalu ditinggal;
- Tidak update patch securitynya;
- dsb.

Masyarakat

Masyarakat akan bingung mau lapor kemana dan bila beda daerah akan banyak **Install** aplikasi lapor yang berbeda.



INFRASTRUKTUR SPBE

Pusat Data Nasional

Ekosistem PD IPPD
berbagi pakai,
Nasional

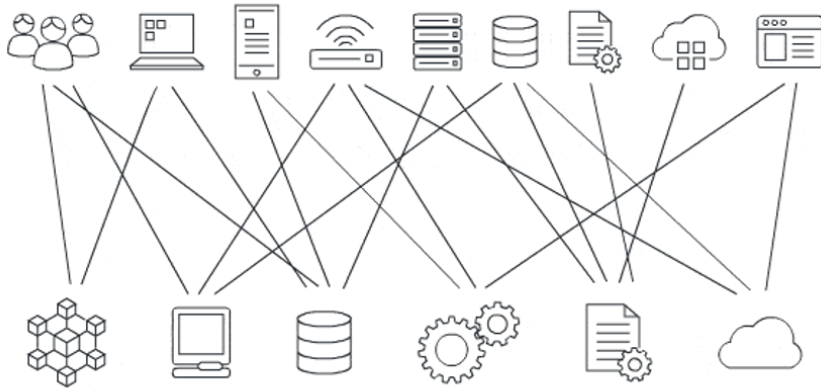
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

SPL Pusat dan SPL
IPPD

Jaringan Intra Pemerintah

Jl Pusat, Jl IPPD

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:
 - a. Pusat Data nasional;
 - b. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 1) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bergantian oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.



Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Pasal 33 Perpres SPBE

Pasal 33

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

Informasi → Interaksi → Transaksi → Kolarborasi → Optimum



Desain Arsitektur Aplikasi SPLP

Core Components:

1. Integration / ESB

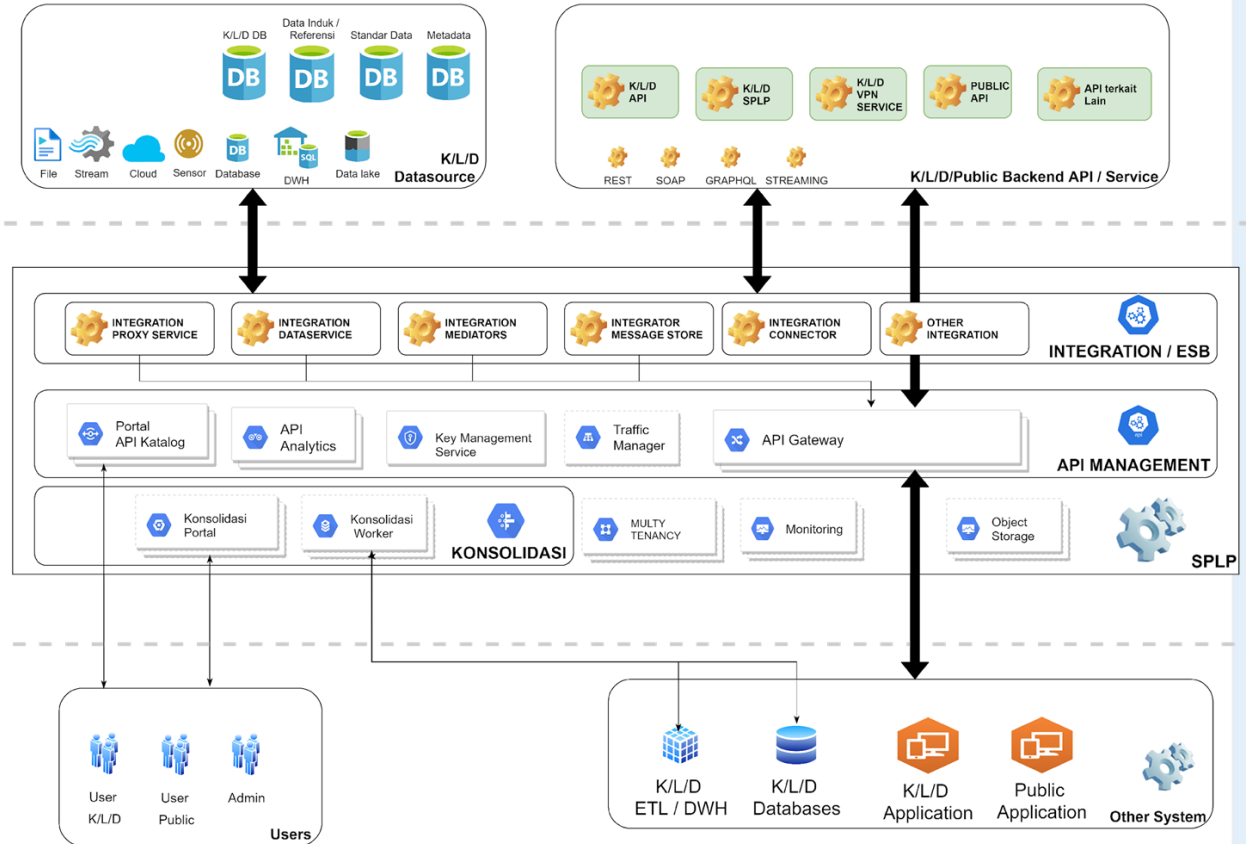
Backend & Service Bus dari proses integrasi layanan pemerintah yang belum memiliki API.

2. API Management

Pusat pengelolaan API untuk berbagi pakai layanan dan data pemerintah (Katalog API).

3. Konsolidasi / ETL Tools

Layanan pengakomodir pengguna dalam melakukan migrasi data antar aplikasi sejenis ke aplikasi umum atau ke versi lain.





Tahapan Integrasi



1. **Resource Categorization** - Melakukan Inventarisir Perangkat Keras dan Lunak
2. **Compliance n Standar** - pengecekan Standarisasi Data dan Metadata dan Bagi Pakai Data
3. **Legacy System Support** - jika migrasi ke system baru pastikan dukungan ke system lama nya.
4. **Middle ware tools** - tools yg digunakan (SPLP)
5. **Authentication and Authorziaton** - implementasi SSO.
6. **Centralized IT Service & Helpdesk Support** - 1 Penanggung Jawab. (Migrasi ke PDN)
7. **Backup, Recovery, and Securirty Policies** - backup and recovery Plan jika migrasi ke system baru.
8. **Hardware and Software Standarization Policies** - Standarisasi Sistem Baru



Proses di SPLP

1. Dokumentasi Aplikasi
2. Dokumentasi Data dan API.
3. Mempublish Service dan API di SPLP
4. Testing Consume dan Post via SPLP
5. Piloting Integrasi Sistem.

default		
GET	/myaccount/profile	🔒
PUT	/myaccount/profile	🔒
PUT	/myaccount/change-password	🔒
GET	/myaccount/institution/profile	🔒
PUT	/myaccount/institution/profile	🔒
GET	/institutions/{id}/internal	🔒
GET	/institutions/{id}/internal/{institution_internal_id}	🔒
GET	/institution-users	🔒
POST	/institution-users	🔒
GET	/institution-users/{institution_user}	🔒
PUT	/institution-users/{institution_user}	🔒
DELETE	/institution-users/{institution_user}	🔒



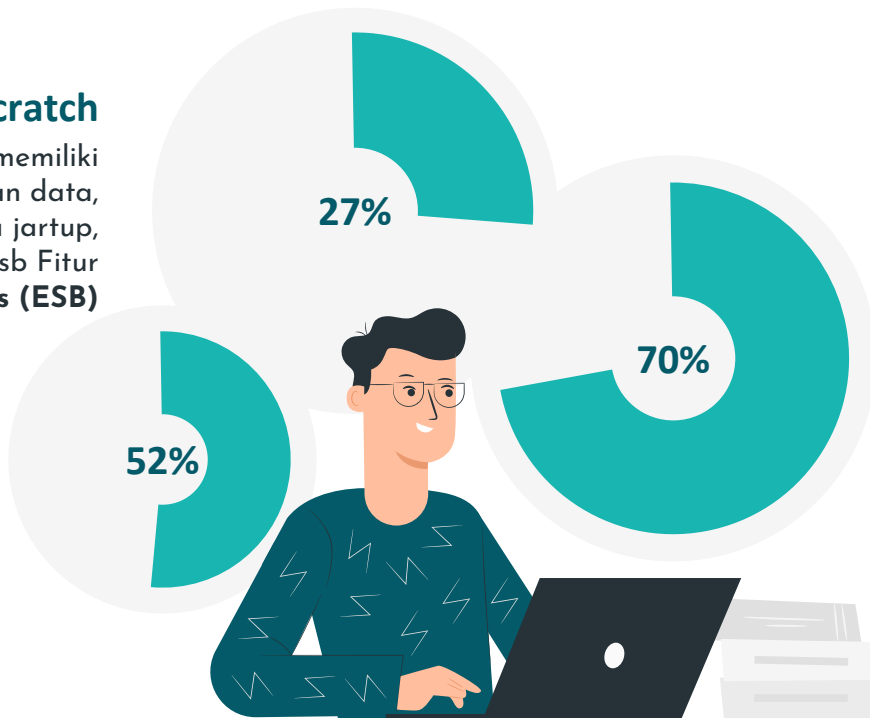
Tipe Pemanfaatan

Scratch

Kondisi Aplikasi belum memiliki API, perlu pendefinisian data, koneksi ke database via jartup, whitelist ip, vpn, dsb Fitur **Enterprise Service Bus (ESB)**

API Ready

Aplikasi sudah memiliki API namun keterhubungan aplikasi masih host to host fitur **API Management (APIM) Tenant**

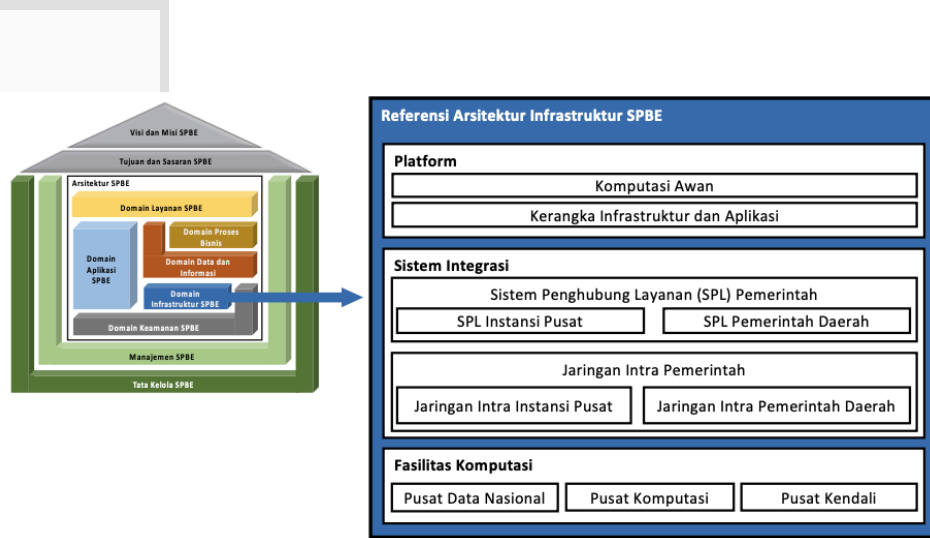


SPL IPPD Ready

SPL IPPD sudah running berjalan, klasifikasi data dan mirroring / export-import SPL IPPD ke SPLP Nasional. SPLP **API Management (APIM) Nasional**



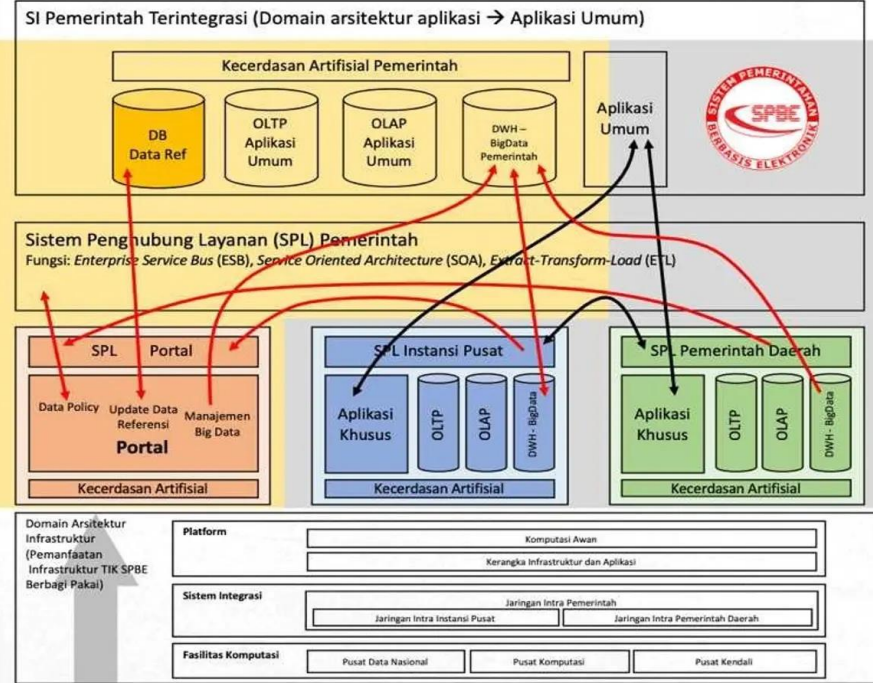
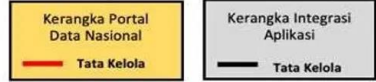
Arsitektur SPBE Nasional



Gambar 24. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional.

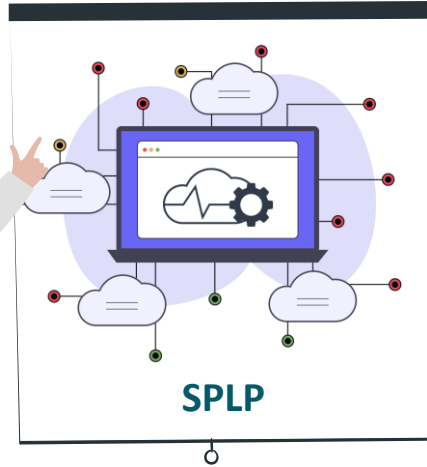
KERANGKA INTEGRASI DATA DAN APLIKASI

Keterangan:





Definisi terkait Interop



Sumber : Permen 1 Tahun 2023

Layanan Interoperabilitas Data (LID) adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai tugas dan wewenangnya untuk memberikan **Interoperabilitas Data** secara andal, akuntabel, dan aman

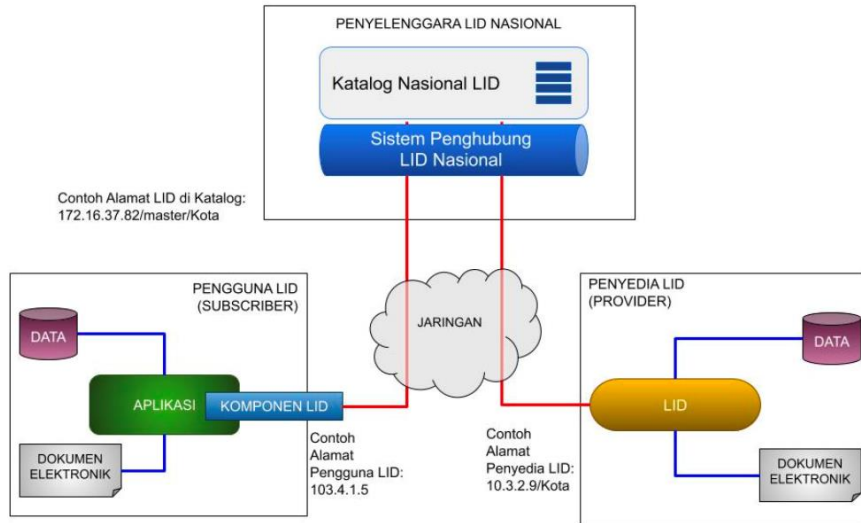
Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan **Karakteristik yang berbeda** untuk **berbagi pakai** data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem Elektronik untuk melakukan **pertukaran layanan** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan **Pengendalian Keterhubungan** antara Sistem Elektronik Penyedia LID dan Pengguna LID Secara Nasional



Layanan Interoperabilitas Data (LID) / API Management

ARSITEKTUR PENYELENGGARAAN LID NASIONAL

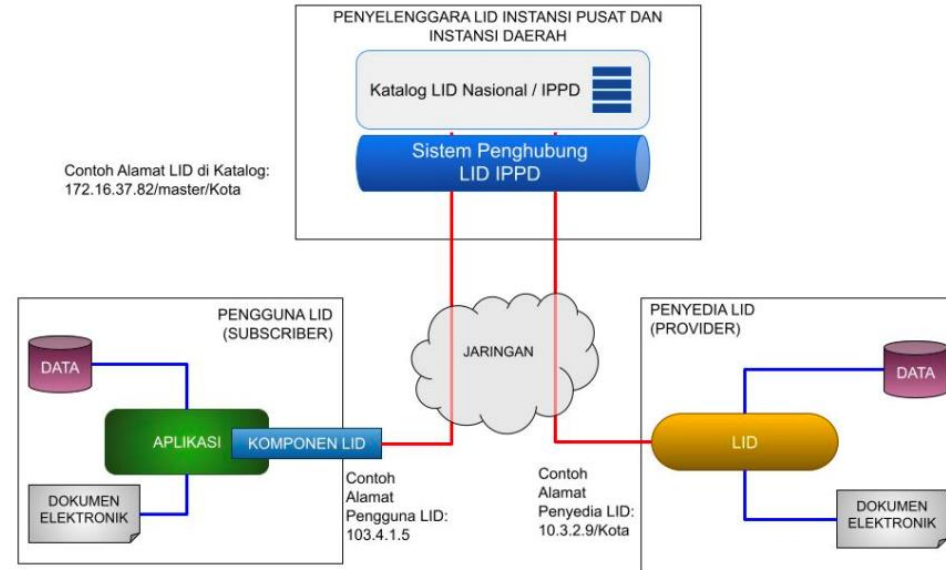


Keterangan:

Penyedia LID dan Pengguna LID adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi lain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan Katalog Nasional LID

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia LID dan Pengguna LID yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Interoperabilitas

ARSITEKTUR PENYELENGGARAAN LID INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH





Peran dalam LID

Penyelenggaraan LID Nasional

adalah Penyelenggara LID yang memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas yang mendukung pemanfaatan Katalog Nasional LID dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.



01 Nasional : Kominfo
IPPD : Satker IT / Dinas Kominfo

Penyedia LID

adalah Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang menyiapkan Data dan informasi sesuai kewenangannya untuk dibagipakaikan dan memberikan akses terhadap Data dan informasi miliknya melalui LID.



02

Pengguna LID

adalah Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang memanfaatkan Data dan informasi yang disediakan oleh Penyedia LID.



03

Nasional : K/L/D
IPPD : Unit Kerja / OPD



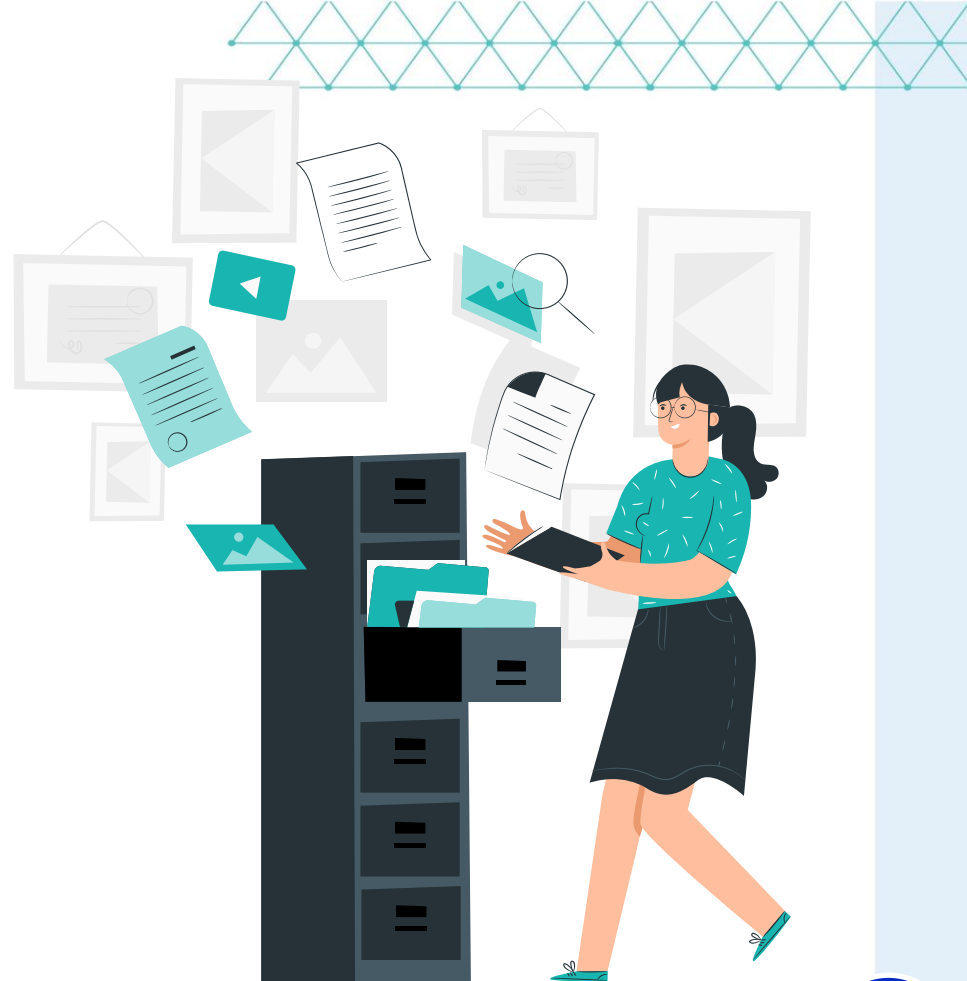


SATU DATA
INDONESIA



Penyelenggaraan Interoperabilitas Data

Adalah **rangkaian kegiatan** Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh Penyelenggara LID Nasional dan Penyelenggara LID IPPD selaku penyedia LID dan/atau Pengguna LID secara terintegrasi dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik





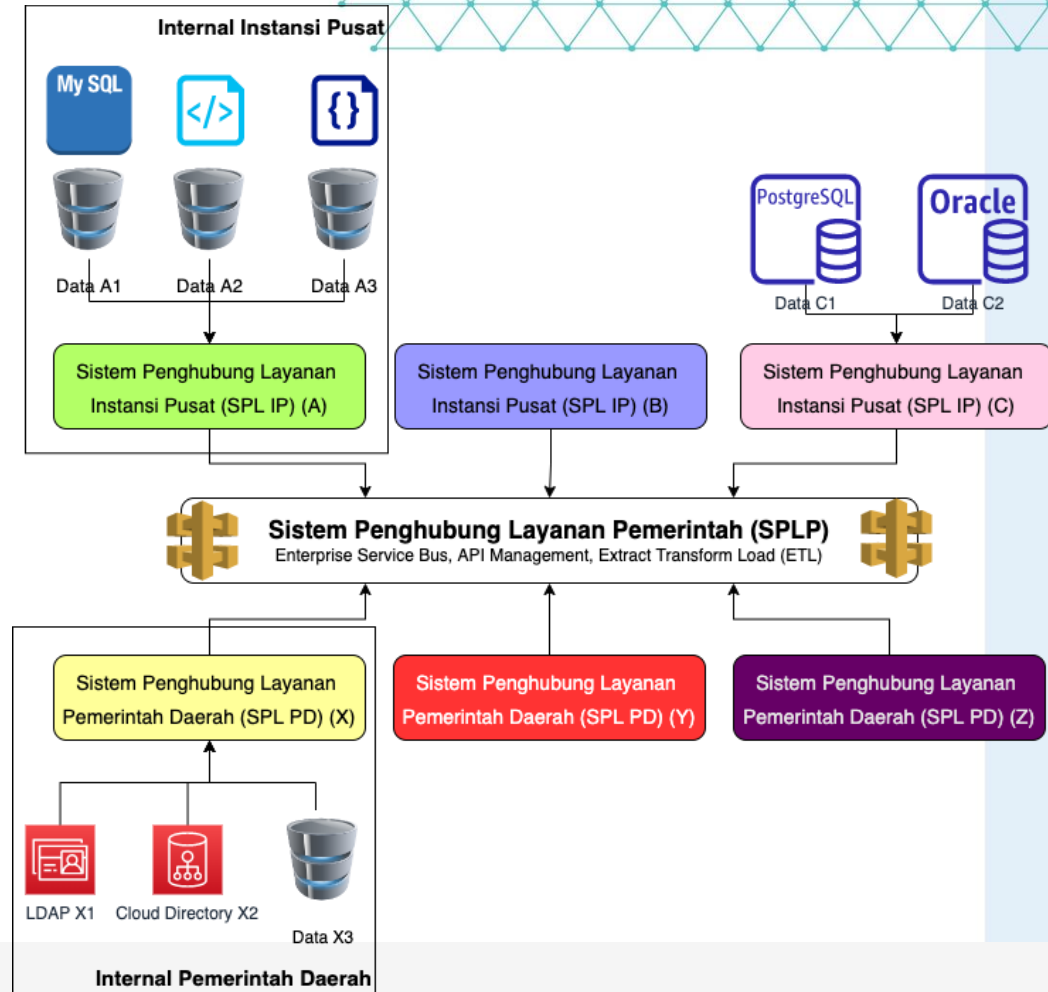
Keterhubungan SPLP – SPL IPPD

Berbagi Pakai Data lintas Satker dan Unit Kerja **tidak boleh** lagi **Host-to-host** atau langsung.

Namun harus melalui Wali Data / Dinas Kominfo / Unit Kerja TIK menggunakan Sistem Penghubung Layanan (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah)

Pasal 27 ayat 9

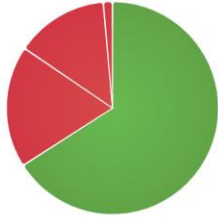
(9) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.





Berbagi Pakai Data di SPLP Nasional

1. Portal **Open Data Daerah**
2. Pemanfaatan Data **API SP4N LAPOR**
3. Pemanfaatan Data **Kode Wilayah Kemendagri**
4. Pemanfaatan Master Data Umum



Status	Value
Success	150
Error	42
Error	32
Error	3

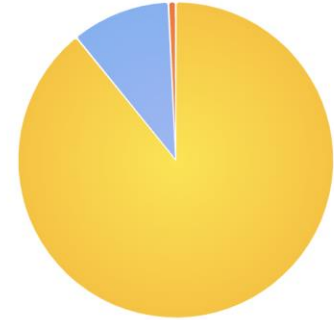
Android,

Linux,

Mac

Windows,

User IP



Browser	Value
Chrome	133
Firefox	15
Chrome	1
Safari	1



KOORDINASI INTERNAL IPPD

Time

Activity

1	✓	Memiliki Teknologi SPL https://komin.fo/dok-req-splp-template
2	✓	Sharing Implementasi SPL dengan Satker/OPD
3	✓	Dokumentasi API
4	✓	Piloting Pemanfaatan SPL Internal
5		Onboarding ke SPLP
6		Piloting Pemanfaatan SPLP

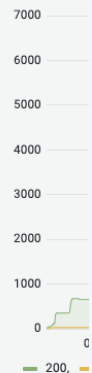
Notes

Indikator 18 Penilaian SPBE mengukur penggunaan, pemanfaatan SPL IPPD dan Keterhubungan dengan SPLP



Tenant D

+ Add New M



- API Name
- Dema-tik,
- MIPP_DEMA
- PORTAL_DE
- SATUDATA

100% DB S

Kons

0% DWH

Kons

100% esb-

porta

100% esb-

porta

100% Esigr

Back

0% GDB

Kons

99.93% Kab.

Back

100% Kab.

SPLP

100% Kab.

SPLP

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Merupakan sistem untuk mendukung interoperabilitas data antar layanan Pemerintah berskala Nasional

Pengguna Layanan

Penyedia Layanan



421

API Published



79

API Created



5

API Deprecated



550

Total User



376

Total Tenant



97

Active Visitor



Daftar Instansi

Sistem penghubung layanan Kementerian / Lembaga / Daerah pada SPLP Nasional

Cari SPL, twostar

Cari



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



BADAN INTELIJEN NEGARA



BADAN KEAMANAN LAUT RI

Lihat Lebih Banyak

Pause

2

REFUSED 103.146.34.37:80

UNREACH 103.146.34.37:80

0ms exceeded

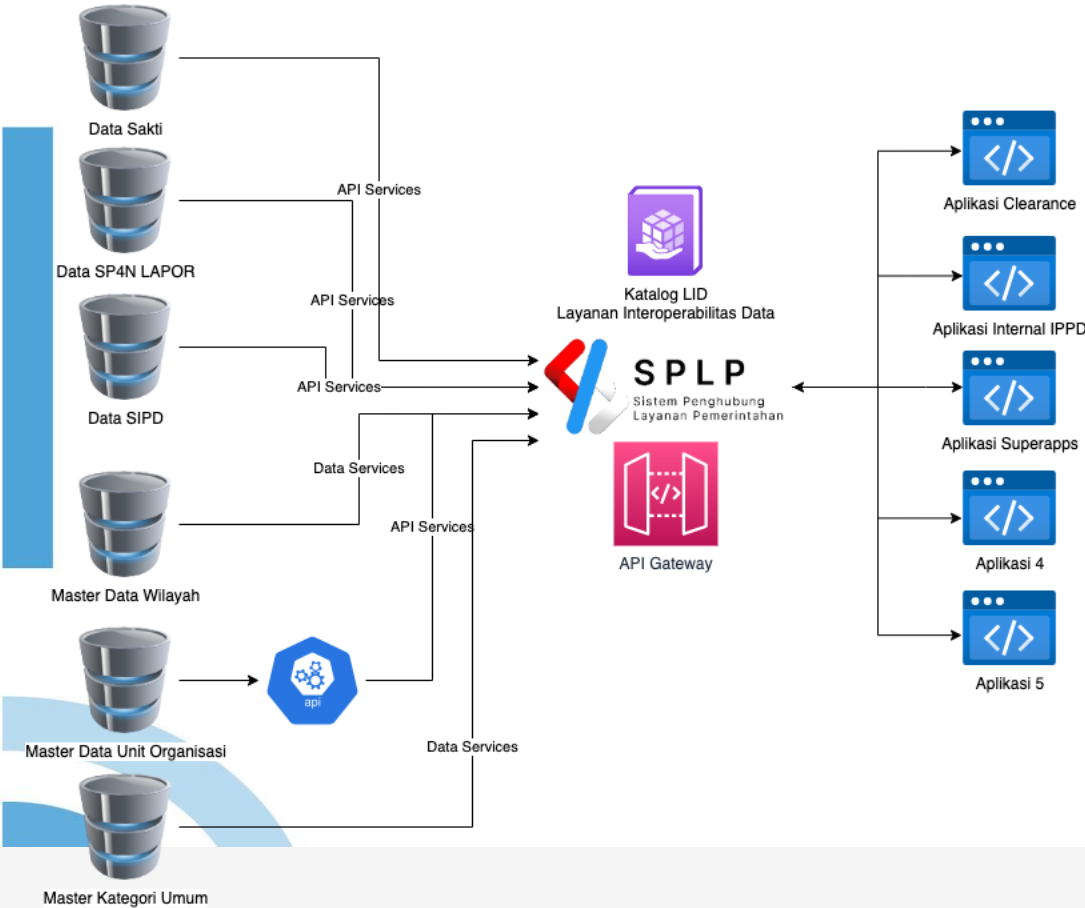
with status code 500

with status code 502

0ms exceeded



Dorongan Interoperabilita Data

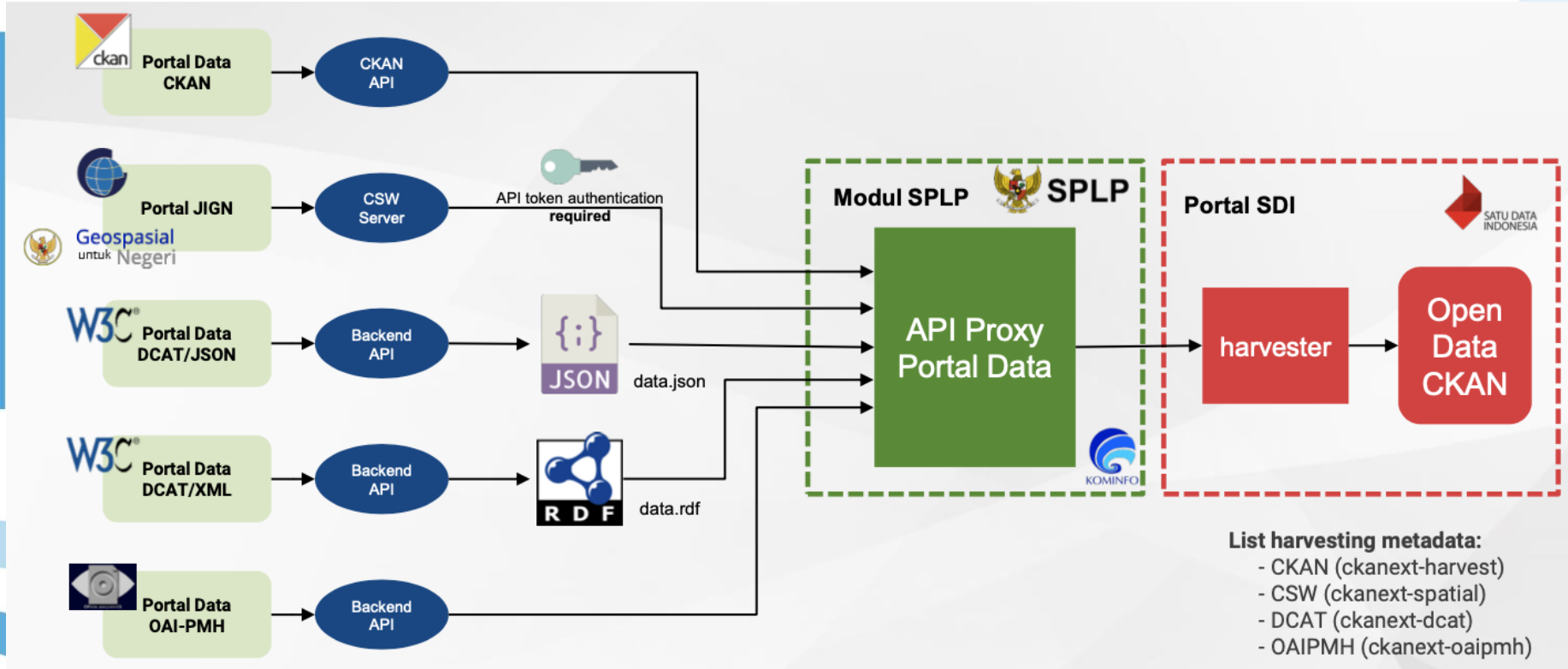


SPLP
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Total User 1534	Total Tenant ▾ 388	Portal Visitors (7 Days) 97
Published API 431	Total Error Call <ul style="list-style-type: none">503, Value: 66401, Value: 44422, Value: 8504, Value: 3301, Value: 2500, Value: 2	
Total Success Call 24.2 K	Total Error Call 123	Created API 73
		Deprecated API 5



Aliran Data Kolaborasi SPLP - SDI





```
{
  "JenisKelamin": [
    {
      "index": 1,
      "id-kode": 1,
      "keterangan-kode": "Laki-laki"
    },
    {
      "index": 2,
      "id-kode": 2,
      "keterangan-kode": "Perempuan"
    }
  ]
}
```

```
{
  "Penduduk": [
    {
      "index": 1,
      "id-kode": 1,
      "keterangan-kode": "WNI"
    },
    {
      "index": 2,
      "id-kode": 2,
      "keterangan-kode": "WNA"
    }
  ]
}
```



```
"Agama": [
  {
    "index": 1,
    "id-kode": 1,
    "keterangan-kode": "Islam"
  },
  {
    "index": 2,
    "id-kode": 2,
    "keterangan-kode": "Kristen"
  },
  {
    "index": 3,
    "id-kode": 3,
    "keterangan-kode": "Katholik"
  },
  {
    "index": 4,
    "id-kode": 4,
    "keterangan-kode": "Hindu"
  },
  {
    "index": 5,
    "id-kode": 5,
    "keterangan-kode": "Budha"
  },
  {
    "index": 6,
    "id-kode": 6,
    "keterangan-kode": "Kong Hu Cu"
  }
]
```

```
"GolonganDarah": [
  {
    "index": 1,
    "id-kode": 1,
    "keterangan-kode": "A"
  },
  {
    "index": 2,
    "id-kode": 2,
    "keterangan-kode": "B"
  },
  {
    "index": 3,
    "id-kode": 3,
    "keterangan-kode": "AB"
  },
  {
    "index": 4,
    "id-kode": 4,
    "keterangan-kode": "O"
  },
  {
    "index": 5,
    "id-kode": 5,
    "keterangan-kode": "A+"
  },
  {
    "index": 6,
    "id-kode": 6,
    "keterangan-kode": "A-"
  },
  {
    "index": 7,
    "id-kode": 7,
    "keterangan-kode": "B+"
  },
  {
    "index": 8,
    "id-kode": 8,
    "keterangan-kode": "B-"
  },
  {
    "index": 9,
    "id-kode": 9,
    "keterangan-kode": "AB+"
  }
]
```

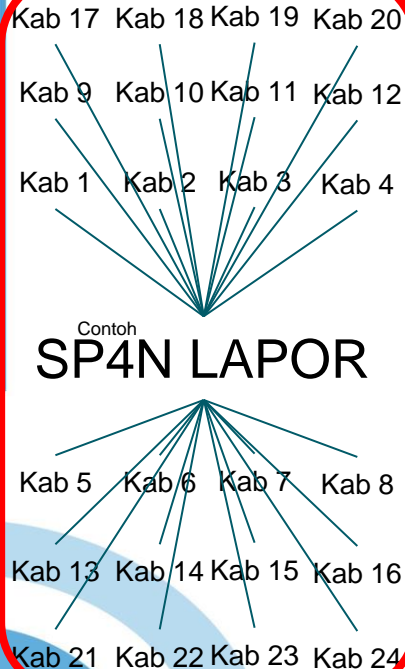
```
"Provinsi": [
  {
    "index": 1,
    "id-kode": 11,
    "keterangan-kode": "Nanggroe Aceh Darussalam"
  },
  {
    "index": 2,
    "id-kode": 12,
    "keterangan-kode": "Sumatera Utara"
  },
  {
    "index": 3,
    "id-kode": 13,
    "keterangan-kode": "Sumatera Barat"
  },
  {
    "index": 4,
    "id-kode": 14,
    "keterangan-kode": "Riau"
  },
  {
    "index": 5,
    "id-kode": 15,
    "keterangan-kode": "Jambi"
  },
  {
    "index": 6,
    "id-kode": 16,
    "keterangan-kode": "Sumatera Selatan"
  },
  {
    "index": 7,
    "id-kode": 17,
    "keterangan-kode": "Bengkulu"
  },
  {
    "index": 8,
    "id-kode": 18,
    "keterangan-kode": "Lampung"
  },
  {
    "index": 9,
    "id-kode": 19,
    "keterangan-kode": "Kepulauan Bangka Belitung"
  }
]
```

```
"BencanaAlam": [
  {
    "index": 1,
    "id-kode": 1,
    "keterangan-kode": "Gempa Bumi"
  },
  {
    "index": 2,
    "id-kode": 2,
    "keterangan-kode": "Tsunami"
  },
  {
    "index": 3,
    "id-kode": 3,
    "keterangan-kode": "Gunung Meletus"
  },
  {
    "index": 4,
    "id-kode": 4,
    "keterangan-kode": "Banjir"
  },
  {
    "index": 5,
    "id-kode": 5,
    "keterangan-kode": "Kekeringan"
  },
  {
    "index": 6,
    "id-kode": 6,
    "keterangan-kode": "Angin Topan"
  },
  {
    "index": 7,
    "id-kode": 7,
    "keterangan-kode": "Tanah Longsor"
  }
]
```



Kesulitan Integrasi Aplikasi Sejenis – Aplikasi Umum

Aplikasi Pelaporan



548 API Pemda
Sementara di Pusat, 1 aplikasi Krisna dipakai semua KL

X

100 aplikasi sektoral

=

54.800 Aplikasi
54.800 API

Ini baru integrasi dalam satu sektor
Bila perlu Rp. 100 juta per API Aplikasi
Maka biaya: Rp. 5,4 T (Pertahun)

X

50 aplikasi sektoral

=

27.400 Aplikasi
27.400 API

Ini baru integrasi dalam satu sektor
Bila perlu Rp. 100 juta per API Aplikasi
Maka biaya: Rp. 2,74 T (Pertahun)

Perlu waktu berapa lama? Dapatkah tercapai di 2024?



Ini baru 4 aplikasi

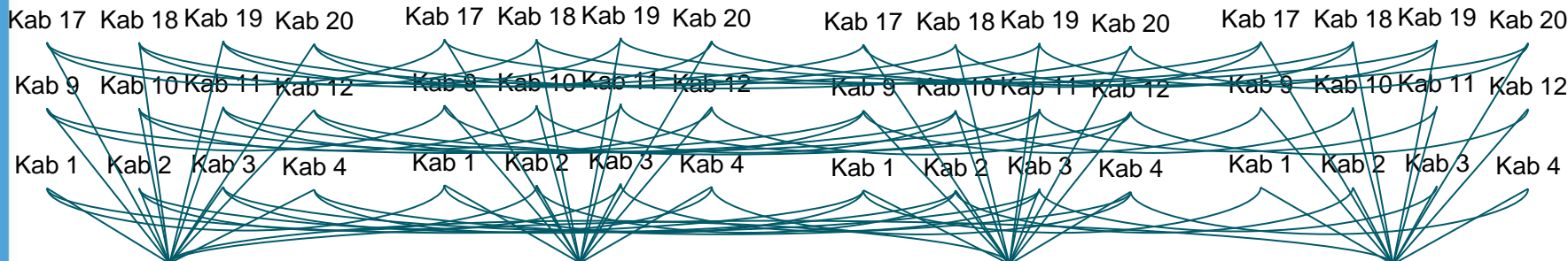
Interoperabilitas 50 aplikasi sejenis
pada 630 KLD = 630^{50-1}

ePlanning

eBudgeting

eKepegawaian

ePelaporan



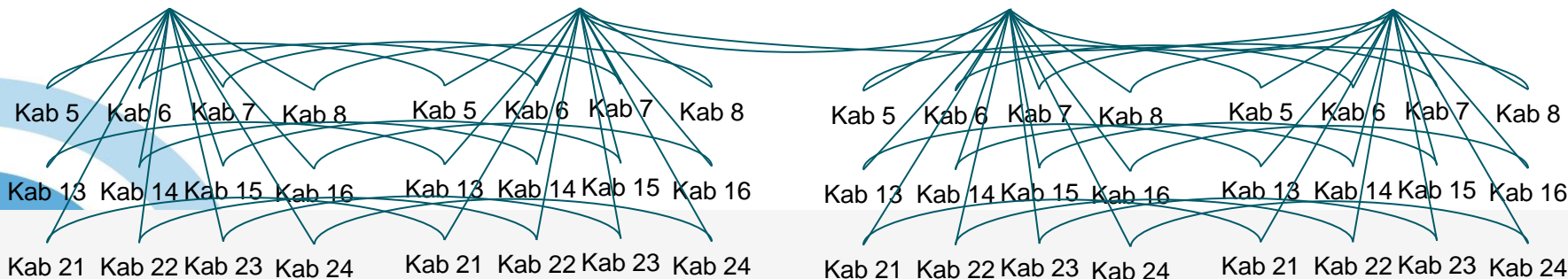
Krisna

SPAN/SAKTI

SIMPEGNAS

SP4N LAPOR

DST





and Monitor Names)

0 2 4 6 8

Start Time: 2021-12-29 15:24:15
End Time: 2022-01-03 15:25:41
Duration: 120 hrs, 1 mins
Status: Up



splp.layanan.go.id SSL certificate and domain expiration info

[SSL notifications](#)

BETA Domain valid until:
July 13, 2024

SSL cert. valid until:
July 6, 2024

Certificate issuer:
DigiCert Inc

Certificate type:
Thawte TLS RSA CA G1

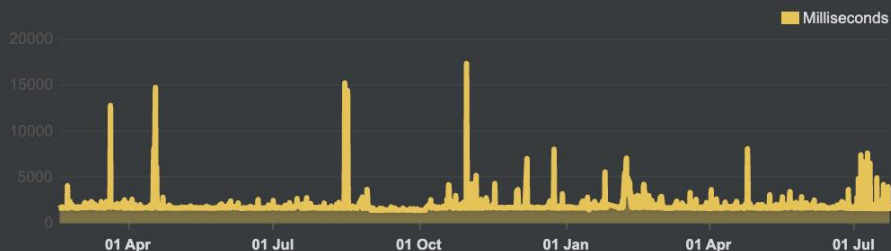
Uptime (99.792%)

Dec 1st 21 - Jul 26th 23



Response Time (1861.35ms av.)

Shows the "instant" that the monitor started returning a response in ms (and average for the displayed period is 1861.35ms).



Current Status

Up

Since 547 hrs, 18 mins (2023-07-03 15:23:54)

[Test notification setup](#)

Uptime

100.000% (last 24 hours)

100.000% (last 7 days)

99.996% (last 30 days)

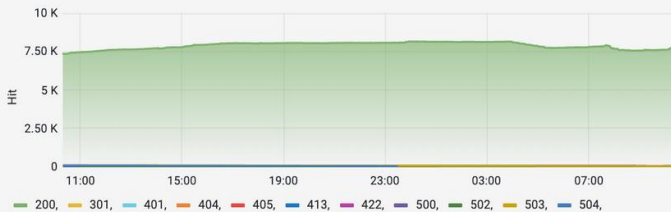
Latest downtime

It was recorded on 2023-07-03 15:22:18 and the downtime lasted for 0 hrs, 1 mins.



Overview

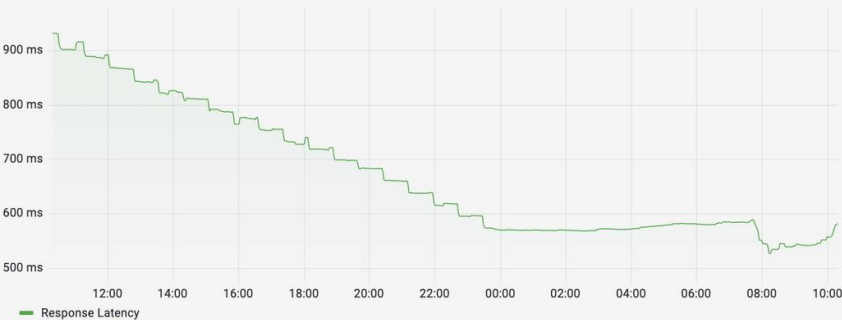
All Traffic By Response Code



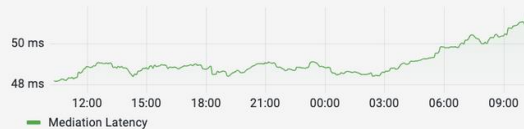
All Traffic



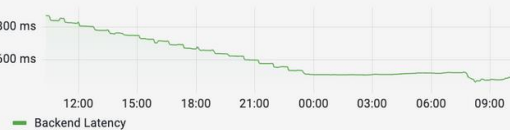
AVG Response Latency



AVG Request Mediation Latency



AVG Backend Latency



Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Total User

934

Total Tenant

339

Portal Visitors (...)

86

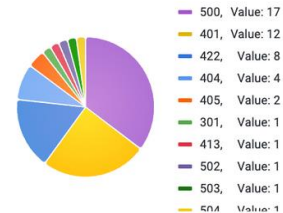
Published API

422

Total Success C...



Total Error Call



Total Error Call



Created API

99

Deprecated API

8



Indikator 7 dan Indikator 18 Penilaian SPBE

Bagi Instansi



INDIKATOR 7

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Penjelasan Indikator:			<p>a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.</p> <p>b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point); 2) Tersedia <i>metadata repository</i>; dan 3) Tersedia <i>service directory</i>. <p>d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>

INDIKATOR 18

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Penjelasan Indikator:			<p>a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.</p> <p>b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE</p>
Penjelasan penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup pemanfaatan dan pengoperasian, serta terdokumentasi secara formal.
Penjelasan dukung:		bukti	Data dukung Sistem penghubung layanan sesuai huruf a, dapat berupa: daftar API yang menggunakan <i>service bus</i> , dan/atau diagram arsitektur aplikasi. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.



Indikator 6 dan Indikator 18 Penilaian SPBE

Bagi Instansi

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.
Penjelasan Indikator:			<p>a. Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan</p>

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data.
Penjelasan Indikator:			<p>a. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik (<i>cloud</i>).</p> <p>b. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.</p>



INDIKATOR 20

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A4	ID-20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE.
Penjelasan Indikator:			<p>a. Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.</p> <p>b. Kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian ide/gagasan SPBE; 2. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK; 3. peningkatan kompetensi teknis; 4. perbaikan kualitas Layanan SPBE; 5. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan 6. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama. <p>c. Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.</p>
Penjelasan penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Kolaborasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup Kolaborasi Penerapan SPBE, serta terdokumentasi secara formal.

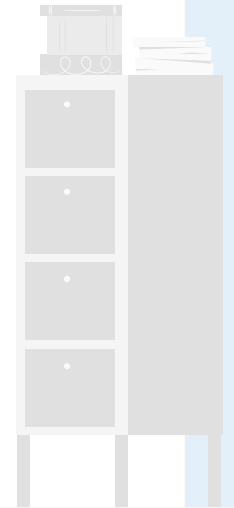
INDIKATOR 5

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
Penjelasan Indikator:			<p>a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.</p> <p>b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan</p>



Akses Materi Bimtek

<https://komin.fo/modul-splp>





**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

◆ Terima Kasih

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9,
Jakarta Pusat 10110
www.kominfo.go.id

 @kemkominfo |  @kemkominfo |  @kemenkominfo

